Nama : Diah Hanifah

NPM : 2413053213

Kelas : 2F

Prodi : PGSD

## Analisis Video Supremasi Hukum

Transformasi kehidupan masyarakat Indonesia dari yang sederhana menjadi kompleks telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan tata kelola negara. Selama berabad-abad, masyarakat Indonesia beroperasi dalam struktur sosial yang lebih sederhana, di mana interaksi dan norma hukum sering kali bersifat informal. Namun, sejak reformasi 1988, perubahan besar terjadi, yang mengarah pada kompleksitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan adil. Hukum modern berperan sebagai pranata sosial yang penting, tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menciptakan tatanan yang melindungi hak-hak masyarakat.

Kemajuan teknologi dan pengetahuan juga membawa tantangan baru bagi negara hukum. Negara harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Jika tidak, ada risiko bahwa praktik korupsi akan merajalela, di mana individu tertentu dapat memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi, sering kali dengan bantuan pengacara yang terampil dalam memanipulasi sistem hukum.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1988 telah membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Mappi menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Ini merupakan langkah positif menuju terciptanya masyarakat yang lebih transparan dan berkeadilan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan adil, tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menghindari jebakan korupsi dan menciptakan negara hukum yang benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, teknologi dan pengetahuan harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem hukum, bukan sebaliknya. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua warganya.